



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN CALIFOUR KETAPANG

WIDYA KRISTANTI

(202020100097)

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP.,M.KP.

Prodi Administrasi Publik

Fakultas Bahasa, Hukum, dan Ilmu Sosial,

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](https://www.facebook.com/umsida1912)



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan tingkat bawah yang mempunyai peranan sangat penting dalam transformasi dan pembangunan masyarakat. (Sya'bani, 2019). Pada umumnya, potensi desa adalah sumber daya alam yang bisa dijaga dengan efisien untuk memberikan faedah. Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai strategi untuk memudahkan desa dalam mengelola potensinya melalui hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang memberikan informasi kepada desa untuk mengelola desanya dengan baik, baik dari segi potensi maupun pengelolaan keuangan desa yang jumlahnya miliaran rupiah. Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa mempunyai kekuasaan pengusulan berdasarkan hak dan kewenangan setempat di tingkat desa. (Astari, 2017). Desa Ketapang mempunyai banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, sumber daya alam yang masih dilestarikan dan sumber daya manusia yang banyak dapat melahirkan kemandirian. Pemerintah Desa Ketapang berencana melakukan revitalisasi Desa Ketapang yang dulunya merupakan desa mati. bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. BUMDes merupakan salah satu pilar kegiatan perekonomian yang mempunyai fungsi komersial dan kelembagaan sosial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa BUMDes juga merupakan suatu badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang, dipilih oleh pemerintah desa, untuk dilaksanakan secara kekeluargaan dan profesional dalam rangka meningkatkan potensi desa dan meningkatkan perekonomian desa. (Atmojo, 2015)

PENDAHULUAN

Tahun	Jumlah Pengunjung
2022	250 Jiwa
2023	70 Jiwa

Sumber : Dioalah dari Pemerintah Desa Ketapang (2023)

Dapat dilihat dari data pada tabel diatas terlihat BUMDes Califour pada akhir tahun 2020 masih dalam tahap pembangunan yang diadakan setiap hari Minggu dengan dihadiri oleh pemerintah desa, PKK, Karang Taruna dan warga sekitar. Di tahun 2021, Califour berhasil menyelesaikan konstruksi dan mencatat jumlah pengunjung sebanyak 250 orang. Namun pada tahun 2022, jumlah pengunjung mengalami penurunan karena kurangnya eksposur di media sosial. Tahun itu, hanya terdapat 70 orang yang mengunjungi Califour. Maka dari itu itu, pemerintah dan warga desa Ketapang kini sedang merencanakan pembangunan baru Califour dan akan dikembangkan pada tahun 2023.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes pengembangan wisata Califour di Ketapang.

1. Terkait penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan langkah BUMDes dalam meningkatkan perekonomian.
2. Permasalahan pendapatan masyarakat desa yang timbul dari Wisata Califour di Kabupaten Sidoarjo.

PENDAHULUAN

No.	Nama	Judul	Teori	Hasil
1.	(Megasari & Sukmana, 2022)	Implementasi Kebijakan BUMDes dalam Pengembangan Agrowisata Belimbing di Desa Watesari, Balongbendo, Sidoarjo	Menggunakan teori Edward III dan berfokus pada indikator seperti pendekatan komunikasi, struktur birokrasi, kdisposisi dan sumber daya.	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kebijakan BUMDes Bina Sejahtera diterapkan dalam pengembangan agrowisata belimbing.
2.	(Meigawati, 2018)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar	teori Van Meter dan Carl Van Horn (sebagaimana dijelaskan dalam Agustino, 2014:139), teori ini mencakup enam faktor yang signifikan yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, pelaksana kebijakan, serta karakteristik individu yang terlibat dalam pelaksanaan bersama dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik.	Hasil riset yang dilakukan Fifianti pada tahun 2018 menunjukkan bahwa efektivitas BUMDes yang beroperasi di Desa Patani dalam mendukung kemandirian desa belum maksimal. Hal ini disebabkan kurang optimalnya keterlibatan dan pengawasan pemerintah desa terhadap para pengelola BUMDes.
3.	(Maulidiah & Megawati, 2022)	Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Desa Wisata (Studi Kasus: BUMDes Sambimadu Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)	teori Van Meter dan Carl Van Horn (sebagaimana dijelaskan dalam Agustino, 2014:139), teori ini mencakup enam faktor yang signifikan yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, komunikasi antar organisasi, disposisi implementor, pelaksana kebijakan, serta karakteristik individu yang terlibat dalam pelaksanaan bersama dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik.	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pedoman BUMDes dalam upaya mengembangkan desa wisata belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Kendala utama yang timbul yakni kurangnya kompetensi

METODE

FOKUS PENELITIAN

- Menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- Dalam studi ini berkaitan dengan konsep teoritis Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dijelaskan dalam Agustino, 2014:139) dan terdiri dari enam indikator utama yakni: 1) Tujuan Kebijakan; 2) Sumber Daya; 3) Komunikasi Antar Organisasi; 4) Disposisi implementor; 5) Karakteristik Agen Pelaksana; 6) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Wawancara
- observasi

TEKNIK ANALISIS DATA

- Teknik pengumpulan data
- Reduksi data
- Penyajian data
- penarikan kesimpulan

SUMBER DATA

- Data primer
- Data sekunder.
- Data bersumber dari wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ketapang, yang dahulu dikenal sebagai Desa yang terkena dampak Lumpur Lapindo, terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Untuk memahami bagaimana kebijakan BUMDes yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Ketapang mempengaruhi perkembangan Califour Ketapang, peneliti melakukan analisis dengan mengaitkan Teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (seperti yang dijelaskan dalam Agustino, 2014:139). Teori ini mencatat enam indikator yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di BUMDes Ketapang dalam upaya pengembangan Califour Ketapang. Ke-6 indikator tersebut dijelaskan seperti berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menjelaskan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mempunyai tolak ukur yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan ukuran kebijakan, dengan tujuan yang jelas dan keberhasilan yang terukur.

Dengan menghubungkan fenomena lapangan dengan teori jenis ukuran variabel dan tujuan kebijakan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya pelaksanaan kebijakan BUMDes Ketapang tampaknya telah berhasil menurut pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:139). Hal ini terlihat dari cakupan dan tujuan kebijakan telah terpenuhi dan sesuai dengan harapan pemerintah desa dan BUMDes Ketapang. Bukti nyatanya adalah perubahan situasi di Desa Ketapang, dimana sebelumnya sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang kaki lima tanpa pekerjaan tetap, terutama di kalangan generasi muda yang menghabiskan waktunya pada kegiatan yang kurang produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.) Sumber Daya

Sumber daya diartikan sebagai komponen dan alat penting yang diperlukan untuk meraih target dan sasaran dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. (Mustika et al., 2022). Ketika menerapkan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang berkualitas sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam penilaian terhadap variabel Sumber Daya, peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes Ketapang dalam pelaksanaan Kebijakan BUMDes tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan yang diutarakan oleh teori Van Meter dan Van Horn (sepaimana dijelaskan dalam Agustino, 2014:139). Ini terutama terkait dengan variabel Sumber Daya Manusia, di mana dalam proses pelaksanaan kebijakan, Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BUMDes Ketapang masih kurang kompeten dalam menjalankan tugas mereka, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diberikan. Namun, sebaliknya, dalam hal Sumber Daya Finansial, dapat dikatakan bahwa BUMDes Ketapang sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (sepaimana dijelaskan dalam Agustino, 2014:139), karena memiliki berbagai sumber modal, termasuk Dana Desa sebesar Rp. 460.000.000 yang dapat digunakan dengan efektif untuk pengembangan Desa Wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.) Komunikasi antar Organisasi

Menurut penelitian (Laili & Choiriyah, 2021), variabel komunikasi merupakan bagian penting dalam implementasi suatu kebijakan atau program untuk menjamin informasi politik dapat terkomunikasikan kepada seluruh pihak sasaran. Melalui komunikasi, maksud dan tujuan suatu kebijakan dapat disebarluaskan secara efektif, sehingga terhindar dari kemungkinan kebijakan tersebut terdistorsi atau ditolak. Berbagai lembaga atau organisasi seringkali terlibat dalam proses implementasi kebijakan, oleh karena itu keberadaan variabel “komunikasi” sangatlah penting.

Dalam konteks komunikasi antar organisasi dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes Ketapang dalam pengembangan desa wisata, peneliti mengindikasikan bahwa komunikasi tersebut sesuai dengan pandangan yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (seperti yang dijelaskan dalam Augustine, 2014:139) . Hal ini tercermin dalam praktik pelaksanaan di lapangan, dimana BUMDes Ketapang dan pemerintah desa Ketapang berkoordinasi dan mengadakan pertemuan rutin dengan berbagai pihak di desa Ketapang, antara lain karang taruna, ketua RT&RW, tokoh masyarakat desa Ketapang dan kerabat. organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Ketapang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang, terdapat keharmonisan dalam konteks sosial. Oleh karena itu, pengembangan agrowisata di Desa Sambibulu dinilai dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat karena memenuhi kebutuhan dan tujuan utama BUMDes, yaitu meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini didukung dengan temuan wawancara peneliti dengan warga desa sekitar Wisata Ketapang Califour.

Melalui penerapan kebijakan BUMDes Ketapang, lingkungan politik mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan desa wisata. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Desa Ketapang pada Lomba Desa Tingkat Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang telah sukses meraih juara kedua. Oleh karena itu peneliti memberikan kesimpulan bahwa implementasi pedoman BUMDes dalam pengembangan kota wisata melalui pengembangan agrowisata berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014: 139). Dukungan yang sesuai diberikan karena kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

KESIMPULAN

Dalam konteks ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan ukuran kebijakan, dengan tujuan yang jelas dan keberhasilan yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pemahaman antara pengambil keputusan politik dan pelaksana politik.

Sumber daya diartikan sebagai komponen dan alat penting yang diperlukan untuk meraih target dan sasaran dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. (Mustika et al., 2022) Ketika menerapkan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang berkualitas sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh sebab itu, saat ini sumber daya merupakan sebuah pemegang kunci yang dapat menentukan kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, sumber daya manusia salah satu faktor yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan BUMDes Ketapang mempunyai kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan pedoman yang dikembangkan. Selain itu, karyawan juga telah diberikan fasilitas pendukung seperti komputer, laptop dan peralatan kantor seperti lemari arsip agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien.

Menurut penelitian (Laili & Choiriyah, 2021), variabel komunikasi merupakan bagian penting dalam implementasi suatu kebijakan atau program untuk menjamin informasi politik dapat terkomunikasikan kepada seluruh pihak sasaran. Melalui komunikasi, maksud dan tujuan suatu kebijakan dapat disebarluaskan secara efektif, sehingga terhindar dari kemungkinan kebijakan tersebut terdistorsi atau ditolak.

Dalam konteks perekonomian pada saat proses pelaksanaan kebijakan BUMDes Ketapang, tingkat perekonomian penduduk masih berada pada kelompok menengah ke bawah. Hal ini tercermin dari masih banyak warga desa, terutama generasi muda, yang menganggur dan lebih memilih berkumpul di warung makan. Namun dengan berdirinya Agroturismo, perekonomian nasional perlahan tapi pasti meningkat.

REFERENSI

- Adnan, R. H., Adityo, R. D., & Machmudi. (2020). *Jurnal Abdi Bhayangkara UBHARA Surabaya*. 03(1), 162–168.
- Astari, A. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 6, 1–14.
- Atmojo, Si. T. (2015). Peran Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(4), 1–87. <http://repository.unej.ac.id/>
- Budiono, S. T., Hasibuan, P. A. S., & Pujowati, Y. (2022). Pendampingan Kinerja BUMDes sebagai Upaya Pengembangan Agrowisata di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. *BERDAYA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 23–29.
- Diare, P. (2018). *PENGARUH PERILAKU IBU TENTANG PROGRAM STBM TERHADAP KEJADIAN DIARE PADA BALITA (The influence of mother ' s behavior on community-based sanitation program on the incidence of diarrhea in infants)*. 3(1), 48–56. <https://doi.org/10.30867/action.v3i1.9>
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Laili, E. N., & Choiriyah, I. U. (2021). Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 64–70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1577>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Publika*, 10(2), 391–406.
- Megasari, N., & Sukmana, H. (2022). Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 41–53. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1885>
- Meigawati, D. (2018). Implementasi Program Bumdes Di kabupaten Suka Bumi (studi kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), konverensi nasional ilmu Administrasi. *Jurnal Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar*. http://eprints.ummi.ac.id/851/%0Ahttp://eprints.ummi.ac.id/851/1/DAFTAR_ISI.pdf
- Mustika, M. E. S., Choiriyah, I. U., & U.B, A. R. (2022). The Implementation of E-government in the Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>
- Rahmawati, D., Handayani, R. D., & Rahmayani, R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung*. 74–82. <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/jsa/article/view/832>
- Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>
- Sya'bani, A. A. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Jurnal Al'iidara Balad*, 2(1), 37–44.
- Ummah, K., & Choiriyah, I. U. (2023). Implementation of E-Government through the Sidoarjo Regency Electronic Office Manuscript Application (E-Buddy) (Case Study in Kajeksan Village Government, Tulangan District, Sidoarjo Regency). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 519–532. <https://doi.org/10.33258/birci.v6i1.7494>

